JURNAL ILMIAH

Volume XVII / Nomor I / Maret 2021

INFOKAM

INFORMASI KOMPUTER AKUNTANSI DAN MANAJEMEN

XII // ISSN 1829 - 9458

Fata Nidaul Khasanah , Sugeng Murdowo

Metode User Centered Design pada Perancangan Aplikasi Reservasi Service Sepeda Motor Berbasis Android Menggunakan AxureRP

Cut Zurnali, Alex Sujanto

Penerapan Electronic Human Resource Management di Perusahaan

Eka Kurniawati, Nibras Anny Khabibah

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Berbasis Akruial pada Dinas X

Khalimatuofi'ah

Sistem Informasi Data Pasien pada Puskesmas Bojong Purbalingga

Wahjono

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah Pengusaha Kue Kereng Desa Krincing Kabupaten Magelang

Subianto

Perancangan Sistem Informasi Penjualan dan Bengkel Sepeda Motor

Heni Rahmawati

Rancang Bangun Sistem Pakar untuk Memprediksi Penyakit pada Ayam Berbasis Android

Sumardi

Sistem Informasi Customer Relationship Management (CRM) Berbasis CMS (Studi Kasus: Koperasi IKAMAS Semarang)

Badan Penerbit Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (BP-P3M)

AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER

"JAKARTA TEKNOLOGI Cipta"

Jl. Kelud Raya No. 19 Telp. 024 - 8310002 Semarang

Journal has been indexed by :

Academia.edu
share research

JURNAL ILMIAH

Vol. XVII, No. 1, Maret 2021

INFOKAM

INFORMASI KOMPUTER AKUNTANSI DAN MANAJEMEN

ISSN 1829 - 9458

SK DIREKTUR AMIK "JTC" SEMARANG
NO. 6305/AMIKJTC/D/IX/2020

Penasehat : Dr. Alex Sujanto, SE, S.Pd, MM. (Direktur)

Pengarah : Kristiawan Nugroho, M.Kom (Pudir I)

Muhamad Danuri, M.Kom (Pudir III)

Penanggung Jawab : Sumardi, S.Kom, M.Kom (Ka Progdi KA)

Subianto, S.Kom, M.Kom (Ka.Progdi MI)

Ketua Dewan Redaksi

Wahjono, SE, M.Si (Ketua Editor)

Sekretaris Editor

Anton Sujarwo, M.Si

Bendahara

Agus Pitoyo, M.Si

Anggota Dewan Editor

Subianto, M.Kom

Sumardi, M.Kom

Dr. Heru Sulisty, SE, MSI (STIE Dharmaputra)

Editor Teknis Dan Pelaksana

Sugeng Murdowo, S.T, S.Kom, M.Kom

Dr. Alex Sujanto, SE, S.Pd, MM

Mitra Bestari Peer Reviewer

Komputer

Daniel Alfa Puryanto, M.Kom (STMIK AKI Pati)

Aslam Fathkudin, M.Kom (Univ. Muh. Pekajangan Pekalongan)

Entot Suhartono, M.Kom (Univ. Dian Nuswantoro)

Fata Nida'ul Khasanah, M.Eng (Univ. Bhayangkara Jakarta Raya)

Akuntansi

Dr. Heru Sulistiy, M.Si, Akt (STIE Dharmaputra)

Arini Novandalina, M.Si (STIE Semarang)

Manajemen

Prof. Dr. Amron, SE, MM (Univ. Dian Nuswantoro)

Entot Suhartono, M.Kom (Univ. Dian Nuswantoro)

Section Editor

Subianto, S.Kom, M.Kom

Administrasi Keuangan

Anintya Rizky N, A.Md

Distribusi

Rizky Viandari, S.Pd

Jurnal Ilmiah INFOKAM terbit minimal setiap 6 bulan sekali (2 X dalam setahun, bulan Maret & September) oleh AMIK "JTC" Semarang dengan maksud sebagai media informasi tentang Komputer, Akuntansi dan Manajemen bagi Sivitas Akademika pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Alamat Redaksi / Penerbit :

Badan Penerbit Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (BP-P3M)

AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER

"JAKARTA TEKNOLOGI CIPTA"

Jl. Kelud Raya No. 19 Telp. 024 – 8310002 Semarang

www.amikjtc.com/jurnal, email : infokam.amikjtc@gmail.com

INFOKAM

INFORMASI KOMPUTER AKUNTANSI DAN MANAJEMEN

ISSN 1829 - 9458

DAFTAR ISI

Metode <i>User Centered Design</i> Pada Perancangan Aplikasi Reservasi <i>Service</i> Sepeda Motor Berbasis Android Menggunakan AxureRP Fata Nidaul Khasanah, Sugeng Murdowo	1 - 8
Penerapan <i>Electronic Human Resource Management</i> di Perusahaan Cut Zurnali, Alex Sujanto	9 – 19
Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Berbasis Akrua! Pada Dinas X Eka Kurniawati, Nibras Anny Khabibah	20 – 26
Sistem Informasi Data Pasien pada Puskesmas Bojong Purbalingga Khalimaturofi'ah.....	27 - 36
Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah Pengusaha Kue Kereng Desa Krincing Kabupaten Magelang Wahjono	37 - 42
Sistem Informasi Layanan Jasa Bengkel Sepeda Motor Subianto	43 - 51
Rancang Bangun Sistem Pakar untuk Memprediksi Penyakit pada Ayam Berbasis Android Heni Rahmawati.....	52 - 62
Sistem Informasi Customer Relationship Management (CRM) Berbasis CMS (Studi Kasus : Koperasi IKAMAS Semarang) Sumardi	63 - 72

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Berbasis AkruaI Pada Dinas X

Eka Kurniawati¹, Nibras Anny Khabibah²

Email: ekhakurnia233@gmail.com¹, nibras@untidar.ac.id²

Program Studi S1 Akuntansi Universitas Tidar

Abstrak

Pemerintah daerah menggunakan aplikasi sistem informasi yang komprehensif untuk merencanakan dan melaporkan pelaksanaan kegiatannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas informasi dan untuk mengetahui seberapa efektivitas suatu sistem berdasarkan kualitas informasi dalam SIMDA Keuangan berbasis akrual di Dinas X. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif yang memberikan penjelasan yang jelas sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah salah satu SKPD yang ada di Kabupaten Magelang dengan menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung dari narasumber. Data terkumpul dari fakta-fakta dalam organisasi kemudian diolah menjadi kalimat-kalimat yang berisi informasi. Kesimpulan dari penelitian ini membuktikan implementasi SIMDA Keuangan berbasis akrual telah meningkatkan kualitas informasi dan telah berjalan secara efektif dan terintegrasi.

Kata kunci : Implementasi, SIMDA, AkruaI

Abstrack

Local governments use a comprehensive information system application to plan and report on the implementation of their activities. The purpose of this research is to analyze the quality of information and to find out how effective a system is based on the quality of information in the Accrual-based Financial SIMDA at the Departement X. The research methodology used in this research is descriptive research using a qualitative method approach that provides a clear explanation in accordance with the conditions that occur in the field. The research location in this study is one of the SKPD in Magelang Regency using data collection techniques carried out through interviews and direct observation of the informants. The data is collected from facts in the organization and then processed into sentences containing information. The conclusion of this study proves that the implementation of accrual-based SIMDA Finance has improved the quality of information and has been effective and integrated.

Keywords : Implementation, SIMDA, Accrual

1. Pendahuluan

Kemajuan sistem informasi sangat penting bagi suatu lembaga atau instansi dalam memperlancar kegiatan sehari-hari maka instansi atau lembaga dituntut untuk dapat melakukan kemajuan di bidang teknologi informasi. Teknologi informasi yang canggih merupakan salah satu syarat yang diperlukan untuk menunjang kegiatan di suatu lembaga atau instansi. Sistem informasi dan teknologi informasi menjadi amat berguna di zaman ini dan memainkan berbagai peran termasuk organisasi pemerintah daerah lantaran mampu mendukung dalam kegiatan yang dapat meningkatkan aktivitas dan keterampilan komunikasi.

Dengan adanya reformasi sektor keuangan Negara, diperlukan perubahan di berbagai bidang untuk mendukung kelancaran reformasi sektor keuangan negara. Salah satu perubahan besar yaitu perubahan akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi, informasi keuangan dapat digunakan oleh semua pihak terutama pada SKPD untuk digunakan sesuai dengan kepentingannya dan tujuan dari instansi tersebut.

Perubahan di bidang akuntansi pemerintah yang diinginkan yaitu adanya perubahan standar atau sistem akuntansi pemerintah. Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sebenarnya dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, agar laporan keuangan yang bersangkutan dapat meningkatkan

kredibilitasnya, sehingga memungkinkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah untuk mewujudkan good governance.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menggantikan "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dengan peraturan pemerintahan, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 mengenai pemerintahan daerah Tahun 2014", sebagai berikut: "Otonomi daerah adalah hak, kekuasaan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan kepentingan pemerintahan serta komunitas lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Undang-undang ini memberikan kewenangan yang luas, lengkap, dan konsisten serta harus bertanggung jawab kepada yang memberikan wewenang dan masyarakat guna memenuhi suatu kebebasan terhadap pemerintah daerah untuk mengontrol serta mengurus sendiri keluarga daerahnya, menetapkan kebijakan mereka sendiri, dan melakukan pembiayaan dan sistem tanggung jawab keuangan sendiri. Maka dari itu, pemerintah daerah dan seluruh SKPD yang menggunakan anggaran wajib menyusun laporan keuangan sebagai sistem pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan.

Dalam hal kegiatan terutama pengelolaan keuangan serta pencapaian tata kelola yang baik, sumber daya manusia tanpa dukungan sistem kerja yang andal dan relevan talenta senior tidak akan berhasil. Maka dari itu, diperlukan suatu sistem informasi manajemen keuangan berbasis teknologi yang akan mendorong organisasi untuk mengolah data secara cepat, lengkap, dan akurat serta dapat terintegrasi secara penuh kemudian memberikan informasi yang andal, relevan, dan terpercaya selama pelaksanaan proses penginputan maupun hasil dari pelaporan data keuangan.

"Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 34 ayat (1) dan Undang-Undang (UU) Nomor Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 70 ayat (2)" pemerintah wajib menyusun dan menyampaikan laporan pendapatan dan belanja negara dengan menggunakan akuntansi akrual sebelum Tahun Anggaran (TA) terakhir tahun 2008. Sejak terbitnya UU keuangan negara, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah penerapan akuntansi akrual di Indonesia. Pada tahun 2005, pemerintah menetapkan "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang mengatur mengenai pengakuan penerimaan serta belanja berbasis kas, sedangkan untuk aset, kewajiban, dan ekuitas menggunakan basis akrual". Guna menghasilkan pelaporan LKPP yang sesuai SAP, pemerintah juga mengembangkan sistem akuntansi pemerintah pusat berbasis sistem akrual kas. dalam rangka membangun mekanisme terpadu untuk memberikan informasi tentang pendapatan dan pengeluaran dengan basis akrual, diterbitkan "Peraturan Dirjen Perbendaharaan (Pardirjen) Nomor 62 Tahun 2009 tentang langkah penyajian informasi pendapatan dan kita belanja secara akrual pada laporan keuangan". Berikutnya, pemerintah juga menerbitkan "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2009 tentang SAP sebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005. PP Nomor 71 Tahun 2010 tersebut mengimplementasikan SAP yang baik berdasarkan akrual pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas paling lambat tahun 2015". Pemerintah pusat telah merumuskan langkah dan strategi untuk menerapkan sistem akrual tersebut.

Salah satu langkah penerapan akuntansi berbasis akrual meliputi pengembangan SIMDA Keuangan. Aplikasi SIMDA adalah aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP. Dengan menggunakan sistem informasi manajemen seperti komputer yang memanfaatkan teknologi dan pengelolaan data elektronik, efisiensi kerja dapat ditingkatkan. Selain itu, sistem informasi manajemen dapat memberikan informasi semua keluaran yang dihasilkan oleh setiap subsistem. Untuk perencanaan serta pelaporan kegiatan pada organisasi perangkat daerah yang relevan, akurat, dan tepat BPKP mengembangkan aplikasi desktop dan berbasis web sebagai aplikasi keuangan untuk menyiapkan rencana kerja dan anggaran bagi pemerintah daerah.

Mengenai SIMDA Keuangan, program ini diperluas menjadi berbasis akrual pada tahun 2015 dimana SIMDA Keuangan sebelumnya masih berbasis kas dan ditandai dengan SIMDA Keuangan versi 2.7. Dasar pengembangan aplikasi SIMDA Keuangan versi 2.7 adalah berdasarkan berbasis 2.7 sistem akrual tersebut antara lain "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 yang mengatur tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual bagi pemerintah daerah".

Tujuan pengembangan SIMDA (Tim Aplikasi SIMDA - BPKP) adalah : 1) Menciptakan informasi yang lebih komprehensif, tepat, dan akurat untuk pengelolaan pemerintah daerah. 2) Menyediakan database lengkap mengenai semua kondisi seperti halnya dari sisi keuangan, aset daerah, pegawai atau perangkat daerah, dan pelayanan publik yang dapat digunakan

untuk mengevaluasi kinerja instansi pemerintah daerah tersebut. 3) Meningkatkan penguasaan aparatur daerah dan memanfaatkan teknologi informasi dengan lebih baik. 4) Memperkuat landasan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah.

Hasil dari wawancara Dinas X telah dilaksanakan aplikasi SIMDA Keuangan versi 2.7 berbasis akrual sejak tahun 2015 sebagai pengganti untuk menggantikan sistem pengelolaan keuangan sebelumnya yang dinilai bukan pilihan terbaik dalam menghasilkan output berupa laporan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah secara lebih tepat waktu dan lengkap serta meminimalkan kesalahan perhitungan data.

Berdasarkan pemberitahuan pemerintah pusat, Dinas X melakukan implementasi SIMDA Keuangan berbasis akrual. Fungsi sistem mengikuti aturan dan regulasi terbaru dan diharapkan dalam menggunakan SIMDA Keuangan dapat meningkatkan pengelolaan data serta informasi dalam rencana kegiatan dan anggaran pemerintah. Analisis sistem baru perlu ditentukan keefektifan aktivitas dibandingkan dengan sistem sebelumnya.

Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kewajiban yang diatur dalam peraturan tentang standar manajemen dalam Peraturan Menteri Nomor 13 Menteri Dalam Negeri Tahun 2006. Berapa amandemen keuangan daerah telah dilakukan, yang terbaru adalah "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan perubahan kedua Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 yang mencakup Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah". Peraturan tersebut mewajibkan setiap SKPD menyusun RKA berdasarkan APBD dan PKD. Tugas pelaksanaan "Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang penerapan sistem informasi keuangan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual". Dalam praktiknya, sistemasi menghadapi beberapa hambatan kendala teknis terkait hal tersebut. Dan keterbatasan informasi dalam proses pelaporan keuangan dan sumber daya manusia serta infrastruktur yang ada.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektivitas sistem didasarkan pada evaluasi kualitas informasi yang diberikan antara SIMDA Keuangan pada Dinas X. Dengan adanya efektivitas sistem yang digunakan sebagai dasar penggunaan aplikasi maka akan menjadi lebih efektif berlaku untuk laporan keuangan dinas tersebut.

2. Tinjauan Pustaka

a. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Sistem informasi manajemen (SIM) adalah sistem yang dapat membantu dalam pengelolaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data, evaluasi dan penyajian data kedalam berbagai informasi bernilai dan akhirnya sampai di mana informasi ini dalam pengambilan keputusan digunakan untuk mendukung fungsi operasi manajemen (Machmud, 2013). Aplikasi sistem informasi manajemen daerah yang dikembangkan oleh BPKP yang disebut aplikasi SIMDA merupakan produk teknologi pemerintah daerah di Indonesia yang menerapkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Menurut Djaja dalam (Budiman dan Arsa, 2013), "aplikasi SIMDA merupakan aplikasi database yang dirancang untuk memudahkan pengelolaan keuangan daerah pada SKPD". Pengembangan aplikasi SIMDA menitikberatkan pada pengimplementasikan SPIP. Oleh karena itu, agar dapat menciptakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan aplikasi SIMDA untuk menghasilkan LKPD aplikasi tersebut harus dikendalikan.

Aplikasi simda dikembangkan oleh badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP). Sejak 2003, Debuti sebagai perwakilan pengawasan manajemen keuangan daerah (bpkp.go.id) merupakan kelompok kerja peningkatan SIMDA Keuangan dan dengan tugas berikut :

1. Sesuai dengan UU yang berlaku dalam rangka memenuhi kebutuhan pengolahan daerah, mengembangkan atau membuat dan memutarakan aplikasi komputer SIMDA terkait dengan pengembangan atau peningkatan kapabilitas pemerintah daerah, sehingga menghasilkan desain database management system (DBMS) yang komprehensif.
2. Dapat meringankan satgas SIMDA perwakilan BPKP untuk membantu pemerintah daerah dalam mengimplementasikan aplikasi komputer SIMDA.

3. Dapat memberikan bimbingan teknis, pelatihan atau sosialisasi dari satgas muda perwakilan BPKP yang akan memberikan informasi untuk membantu atau mengimplementasikan aplikasi komputer SIMDA.

Tujuan peningkatan dari aplikasi SIMDA ini adalah :

1. Menyediakan database yang lengkap tentang kondisi daerah dalam hal keuangan, aset daerah, pegawai atau perangkat daerah dan pelayanan publik yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja instansi pemerintah daerah.
2. Mempersiapkan pejabat daerah untuk lebih memahami dan menggunakan teknologi informasi. Memperkuat landasan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah.
3. Memberikan informasi yang lengkap dan akurat untuk pengelolaan pemerintah daerah.

b. Laporan keuangan

Laporan keuangan adalah laporan yang merangkum informasi akuntansi keuangan yang penting bagi suatu organisasi. Laporan keuangan dirancang untuk mentransfer informasi keuangan. (Soemarsono, 2004 hal.34) "laporan keuangan dirancang untuk mengambil keputusan terutama pihak di luar lingkungan suatu organisasi guna melihat mempelajari serta mengenai bagaimana posisi keuangan dan hasil pencapaian usaha suatu organisasi tersebut apakah baik atau tidak".

Berdasarkan pada "peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dalam peraturan umum keuangan daerah disebutkan bahwa keuangan daerah adalah bagian dari seluruh hak atau kewajiban daerah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan yang diukur dengan mata uang atau segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan seluruh hak dan kewajiban daerah".

3. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif yang memberikan penjelasan yang jelas sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan, dengan maksud peneliti mengumpulkan data informasi dari fenomena yang terjadi di instansi kemudian mengolah menjadi kalimat narasi. Informasi tersebut didapat dari narasumber kepala sub bagian program dan keuangan dan operator simda dalam proses akuntansi di Dinas X. (Krill dan Miller, 2000 hal.3) "mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi dalam ilmu sosial yang pada dasarnya bergantung pada pengamatan tentang masyarakat dan bidangnya serta terkait dengan bahasa dan peristilahannya".

Data yang dipakai untuk penelitian ini adalah data primer, yaitu menggunakan metode melalui observasi dan wawancara secara langsung di Dinas X. Metode observasi dilakukan dengan pengamatan langsung pada proses penginputan data pengeluaran kas pada aplikasi SIMDA Keuangan di Dinas X. Sedangkan wawancara ini dilakukan secara langsung dengan narasumber kepala sub bagian program dan keuangan dan operator SIMDA Keuangan.

4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas akan disajikan hasil penelitian melalui informasi yang diperoleh melalui wawancara langsung. Gambaran pelaksanaan SIMDA keuangan berbasis akrual pada Dinas X. Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh Dinas X mengenai sosialisasi dan pelatihan komunikasi dalam implementasi simda berbasis akrual pada Dinas X, secara umum sudah dilaksanakan dengan baik namun setiap SKPD memerlukan sosialisasi dan pelatihan berkala menanggapi regulasi dan teknologi yang sangat dinamis dan terus berubah sesuai zaman yang dapat meningkatkan fungsionalitasnya.

Sesuai peraturan perundang-undangan (BPKP.go.id). aplikasi simda keuangan dirancang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, seperti :

- a. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
- b. Undang undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
- c. PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
- d. PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
- e. Permendagri 21 Tahun 2011, tentang pengelolaan keuangan daerah.

Menurut hasil yang diperoleh dari narasumber, aplikasi keuangan SIMDA secara teknis tidak memerlukan spesifikasi komputer yang canggih dan tinggi sehingga tidak memerlukan biaya pembelian perangkat keras yang khusus atau berlebihan. Tetapi untuk jaringan membutuhkan jaringan yang kuat dan stabil.

Dinas X merupakan salah satu instansi yang berperan sebagai bendahara pengeluaran dalam SKPD. Sistem akuntansi pengeluaran kas adalah sistem yang digunakan untuk mencatat semua transaksi pembayaran tunai. Penatausahaan pengeluaran kas adalah rangkaian proses penerimaan, penyimpanan, penyeteroran, pembayaran, penyerahan, dan penanggung jawab atas pengeluaran yang dikelola oleh SKPD. Hasil dari wawancara sistem akuntansi pengeluaran kas terdiri atas 4 subsistem yaitu :

1. Sub sistem akuntansi pengeluaran kas pembebanan uang persediaan
2. Sub sistem akuntansi pengeluaran kas pembebanan ganti uang
3. Sub sistem akuntansi pengeluaran kas pembebanan tambahan uang
4. Sub sistem akuntansi pengeluaran kas pembebanan langsung

Proses penginputan dengan menggunakan aplikasi SIMDA pada Dinas X yang telah dijelaskan oleh operator SIMDA salah satunya adalah penginputan Ganti Uang (GU) prosesnya terdiri sebagai berikut :

1. Penginputan ke dalam buku kas umum pengeluaran
2. Tutup buku
3. Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
4. Pembuatan Pembayaran Uang Persediaan (SPP)
5. Verifikasi Pembayaran Uang Persediaan (SPP)
6. Pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM)
7. Status Final

a. Evaluasi penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)

Hasil evaluasi penilaian kualitas laporan keuangan Dinas X dengan menggunakan aplikasi SIMDA keuangan berbasis akrual dapat membuktikan peningkatan kecepatan pemrosesan data dan representasi data dikaitkan dengan simda keuangan berbasis sistem akrual dalam pengelolaan keuangan. Aplikasi tersebut sudah mencakup seluruh proses pelaporan sehingga proses perencanaan dan pelaporan kegiatan tidak perlu memasukkan angka secara berulang atau berpindah dari buku ke buku lain. Kenaikan dari kriteria relevan, akurat, dan ketepatan waktu, artinya informasi yang dihasilkan oleh aplikasi SIMDA keuangan berbasis sistem akrual memiliki kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan aplikasi sebelumnya. Dengan menggunakan aplikasi simda keuangan berbasis akrual, laporan bulanan, triwulanan serta tahunan dapat dapat dicek dipantau kapan saja dan dibuat saat dibutuhkan.

b. Kendala yang dihadapi dalam penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)

Dalam penerapannya aplikasi SIMDA keuangan di Dinas X, aplikasi SIMDA keuangan masih kurang fleksibel sehingga semua perbaikan sistem aplikasi hanya bisa menunggu respon dari BPKP sebagai peningkatan program SIMDA keuangan dan permasalahan terakhir yaitu pada sumber daya manusia selaku operator yang masih belum maksimal dalam mengoperasikan SIMDA keuangan dikarenakan kurangnya sosialisasi atau pelatihan dalam penggunaan simda keuangan. Dan tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, karena terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya sehingga menyebabkan penerapan aplikasi SIMDA keuangan tidak berjalan secara optimal. Seperti halnya belum terintegrasi dengan seluruh SKPD secara online, oleh karena itu transfer data keuangan masih dilakukan secara manual. Namun,

c. Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) pada laporan keuangan

Indikator efektivitas adalah sejauh mana rencana tersebut mempengaruhi pencapaian tujuan rencana tersebut. Semakin besar kontribusi pencapaian dan tujuan yang telah ditetapkan terhadap rencana atau output maka semakin efektif proses kerja unit organisasi atau lembaga instansi tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh "Satroes (2011, h.33), efektivitas dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu : (a) Efektivitas pribadi, yang merupakan tingkat efektivitas yang paling dasar dan konten yang paling ditekankan terkait dengan pekerjaan beberapa orang dalam suatu organisasi; (b) Efektivitas kelompok, yang

mengacu pada efektivitas penekanan kontribusi dari semua anggotanya; (c) Efektivitas organisasi, adalah kombinasi dari efektivitas kelompok dan efektivitas individu untuk bersatu dan menghasilkan tingkat output yang lebih tinggi”.

Selanjutnya akan laporan keuangan menjadi relevan dan efektif, maka sumber datanya harus andal terpercaya, akurat, tepat waktu dan tersedia dalam bentuk yang sesuai untuk masing-masing lembaga atau instansi. Maka dari itu, untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan, proses ini harus disempurnakan dengan baik di semua organisasi instansi. Sebagaimana menurut "(Hamilton, 1985 hal.6) Laporan keuangan yang lebih efektif memerlukan kriteria : 1) Dapat dipercaya, 2) Ketepatan, 3) Tepat waktu, 4) Format Laporan". Yang kemudian akan dijelaskan dari hasil wawancara oleh narasumber kepada sub bagian program dan keuangan dan operator simda keuangan di dinas x sebagai berikut :

1) Dapat dipercaya

Dari hasil wawancara diketahui bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh SIMDA keuangan dapat dipercaya. Menurut Informasi yang disampaikan narasumber bahwa terdapat proses verifikasi ataupun pembahasan yang dilalui sebelum dilakukan pencairan, oleh karena itu secara bersamaan laporan keuangan telah sesuai mengingat jika terjadi kesalahan pasti telah terdeteksi pada saat dilakukannya verifikasi pengolahan data.

2) Ketepatan

Jika dicek atau diperiksa untuk memastikan ketepatan formulir laporan keuangan terkait dalam bentuk atau format laporan, maka SIMDA keuangan dianggap telah memenuhinya dan SIMDA keuangan telah sesuai pada peraturan dan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Salah satu prosesnya adalah dengan memasukkan GU.

3) Tepat waktu

Dengan diaplikasikannya SIMDA keuangan, proses penyusunan anggaran penyusunan laporan keuangan menjadi cepat dan lebih tepat waktu. Dikarenakan sistem simda keuangan bersifat otomatis hanya saja item data yang perlu dimasukkan dan data tersebut dapat digunakan untuk tujuan lain, meski harus memasukkan data satu persatu tetapi tidak perlu lagi memasukkan secara manual.

4) Format laporan

Berdasarkan pengamatan bahwa didalam SIMDA keuangan laporan keuangan dapat memenuhi persyaratan Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 tahun 2007, juga sesuai dengan format yang terdapat dalam Standar Akuntansi Pemerintahan yang diatur dalam PP nomor 24 tahun 2005.

5. Kesimpulan

Jadi hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa aplikasi SIMDA keuangan telah tercapai dengan baik meskipun dalam proses implementasi aplikasi SIMDA keuangan masih ada beberapa kendala yang berpengaruh dalam proses pelaksanaan aplikasi SIMDA keuangan, namun dalam penerapan aplikasi SIMDA keuangan di Dinas X cukup untuk dikatakan telah berjalan secara efektif. Kemudian, aplikasi SIMDA keuangan berbasis akrual yang diterapkan Dinas X dapat digunakan sebagai aplikasi sistem informasi manajemen untuk mengelola keuangan pemerintah daerah secara terintegrasi. Prosedur pengelolaan keuangan aplikasi SIMDA keuangan telah diterapkan dengan baik. Aplikasi SIMDA keuangan menghasilkan informasi laporan keuangan dengan kualitas dapat dipercaya, ketepatan, tepat waktu, dan format atau bentuk-bentuk laporan yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Aplikasi SIMDA keuangan. <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/versi-2.1.bpkp> (1/03/2020)
- Budiman, Fuad dan Arza, Fefri Indra. 2013. Pendekatan Technology Acceptance Model dalam Kesuksesan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah. Jurnal WRA, 1(1), 87-110
- Hardjanto, K. (2019). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Keuangan Berbasis Akrual Pada Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang. Jurnal Teknik Informatika, 12(1), 11-20.